



Analisis
PAGU ANGGARAN
2025

ANGGARAN BADAN INTELIJEN NEGARA TAHUN 2026: PERLU DIPRIORITASKAN PADA UPAYA DETEKSI DAN ANTISIPASI ANCAMAN KEAMANAN DI WILAYAH TERTENTU

Realisasi anggaran Badan Intelijen Negara (BIN) sepanjang 2020 hingga 2024 berfluktuasi. Realisasi anggaran pada 2020-2021 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dan mengalami penurunan 4,13% pada 2022. Pada 2023-2024 kembali mengalami peningkatan signifikan dan kembali mengalami penurunan signifikan pada 2025¹ (Gambar 1). Proporsi terbesar mayoritas dialokasikan pada Program Pengembangan, Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara (Program P4KN), rata-rata 66,68% per tahun sepanjang 2020-2024.

Pada 2026, alokasi pagu anggaran BIN sebesar Rp 16,45 triliun atau meningkat 6,51% dibanding *outlook* 2025. Pagu anggaran 2026 tersebut antara lain dimanfaatkan untuk mendukung prioritas nasional melalui kegiatan: (1) operasi intelijen kontra terorisme; (2) operasi intelijen kontra separatisme; dan (3) sekolah tinggi intelijen negara (RAPBN 2026). Alokasi tersebut juga nantinya akan dimanfaatkan untuk melaksanakan tujuan intelijen negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yakni mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.

Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (RPJMN 2025-2029), alokasi anggaran BIN 2026 ditujukan untuk mencapai target indikator Program Prioritas Intelijen dan Keamanan Dalam Negeri dalam Asta Cita 2. Indikator dimaksud yaitu *Fragile State Index* (FSI), dengan target 59,2 pada 2029. Berdasarkan target yang telah ditetapkan tersebut, perencanaan dan pelaksanaan anggaran BIN 2026 perlu diprioritaskan pada upaya deteksi dan antisipasi di wilayah tertentu yang memiliki risiko ancaman terhadap keamanan negara.

Posisi *Fragile States Index* Indonesia Masih Kategori Warning

FSI merupakan indeks yang rutin dikeluarkan Fund for Peace. FSI merupakan indeks yang menilai tingkat kerapuhan atau kerentanan suatu negara terhadap konflik atau keruntuhannya institusional berdasarkan berbagai tekanan dan potensi konflik atau ketidakstabilan internal. Indeks ini

¹ Alokasi 2025 menggunakan data *outlook* 2025 sebagaimana tercantum dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun 2026

menggunakan 12 indikator utama, yang masing-masing terbagi ke dalam 4 dimensi, yakni Kohesi², Ekonomi³, Politik⁴ dan Sosial⁵ (Tabel 1).

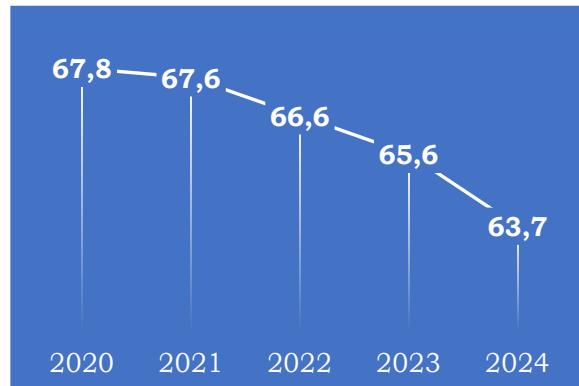
Tabel 1. Dimensi dan Indikator FSI

Cohesion	Economic	Political	Social
Security Apparatus	Economic Decline	State Legitimacy	Demographic Pressures
Factionalized Elites	Uneven Economic Development	Public Services	Refugees and IDPs
Group Grievance	Human Flight and Brain Drain	Human Rights and Rule of Law	External Intervention

Sumber: The Fund For Peace, 2024 (diolah)

Setiap indikator dinilai dengan skor dari 0 (sangat stabil) hingga 10 (sangat rapuh), sehingga nilai minimum FSI yaitu 0 dan nilai maksimum FSI yaitu 120. Nilai indeks tersebut dikategorisasi menjadi *Sustainable* (0-29,9), *Stable* (30-59,9), *Warning* (60-89,9) dan *Alert* (90-120). Sepanjang 2020-2024, nilai FSI Indonesia terus membaik atau menurun (Gambar 2). Penurunan ini menunjukkan tingkat kerapuhan atau kerentanan Indonesia semakin mengecil menuju kondisi stabil. Namun saat ini masih pada kategori *warning*.

Kategori *warning* tersebut menunjukkan masih memiliki risiko yang relatif besar, sehingga fokus pada pengelolaan dan penanganan berbagai determinan tingkat kerapuhan atau kerentanan harus tetap dilakukan. Apabila merujuk pada sebaran nilai menurut indikator, terdapat beberapa determinan yang perlu menjadi perhatian BIN, yakni *factionalized elites*, *group grievance*, *human flight and brain drain* dan *demographic pressures* (Gambar 3).



Gambar 2. Perkembangan Nilai FSI Indonesia 2020-2024

Sumber: The Fund For Peace, 2024 (diolah)

² Indikator dalam dimensi kohesi secara umum mengukur atau menilai: (i) kekuatan, profesionalisme, dan relititas institusi keamanan seperti militer dan polisi; (ii) fragmentasi elit politik dan ketegangan antar kelompok kekuasaan; dan (iii) ketegangan dan diskriminasi antar kelompok etnis, agama, atau kelompok sosial lainnya.

³ Indikator dalam dimensi ekonomi secara umum mengukur atau menilai: (i) kondisi perekonomian seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, inflasi, utang, dan penurunan ekonomi secara umum. Kondisi ekonomi yang memburuk meningkatkan risiko kerentanan negara; (ii) ketimpangan pembangunan ekonomi antar kelompok masyarakat atau wilayah; dan (iii) migrasi tenaga kerja terampil dan profesional ke luar negeri.

⁴ Indikator dalam dimensi politik secara umum mengukur atau menilai: (i) kepercayaan, pengakuan dan penghormatan terhadap otoritas negara; (ii) kemampuan negara menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, air bersih, dan infrastruktur; dan (iii) perlindungan terhadap hak asasi manusia, kebebasan sipil, sistem hukum yang adil, dan akses ke keadilan.

⁵ Indikator dalam dimensi sosial secara umum mengukur atau menilai: (i) tekanan demografi seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, degradasi lingkungan, bencana alam, kelangkaan pangan, dan penyebaran penyakit; (ii) tekanan akibat perpindahan populasi, baik dari dalam negeri maupun dari negara lain; dan (iii) keterlibatan kekuatan asing dalam urusan dalam negeri, baik berupa bantuan militer, intervensi ekonomi, maupun politik.

Perhatian tersebut diperlukan juga didasarkan pada perkembangan beberapa parameter di dalam negeri yang cenderung identik dengan ketiga indikator FSI tersebut. Pertama, tingkat urbanisasi di Indonesia sebagai salah satu gambaran *demographic pressures* mengalami tren meningkat sepanjang 2000 hingga 2020. Jumlah

penduduk Indonesia di perkotaan pada 2000 sekitar 30%, meningkat menjadi 49,8% pada 2010 dan kembali meningkat menjadi 56,7% pada 2020. Kedua, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tingkat provinsi yang dapat dijadikan sebagai salah satu gambaran *fractionalized elites*, masih di bawah 80 dan menurun di 2023 dibanding tahun sebelumnya. Pada 2021 sebesar 76,08, meningkat menjadi 77,95 pada 2022, dan mengalami penurunan di 2023 menjadi 77,21. Ketiga, tingkat pengangguran terbuka yang berasal dari diploma/universitas yang dapat dijadikan proksi potensi *human flight and brain drain*, masih tinggi dan cenderung meningkat. Persentase pada 2024 sebesar 13,56%, meningkat 13,33% dibanding 2015 yang sebesar 11,97%.

Fragile Regional Index: Gambaran Antisipasi Kerentanan Keamanan

Capaian nilai FSI Indonesia yang masih dalam kategori *warning* tersebut menunjukkan bahwa BIN sebagai koordinator/pengampu program prioritas intelijen dan keamanan dalam negeri dalam Asta Cita 2 RPJMN 2025-2029 harus tetap fokus pada beberapa indikator yang pencapaiannya dapat berpotensi menciptakan kerapuhan atau kerentanan atau ketidakstabilan kondisi keamanan dalam negeri. Dalam perspektif regional atau kewilayahan di Indonesia, fokus perhatian tersebut juga harus diarahkan untuk memprioritaskan pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi risiko tinggi. Guna memetakan potensi risiko menurut wilayah, penulis mencoba menyusun *Fragile Regional Index* (FRI) dengan menggunakan konsepsi dasar FSI dan variabel atau indikator yang datanya tersedia menurut provinsi. FRI



Gambar 3. Perkembangan Nilai FSI Indonesia 2020-2024 Berdasarkan Indikator
Sumber: The Fund For Peace, 2024 (diolah)

Tabel 2. Dimensi dan Indikator *Fragile Regional Index* Indonesia 2024

DIMENSI	INDIKATOR	SUMBER DATA	TAHUN DATA
Kohesi	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Kemenag	2024
Ekonomi	Indeks Gini (IG)	BPS	2024
	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Pengkap)	BPS	2024
Politik	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	BPS	2023
Sosial	Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang Atau Berat (PKP)	BPS	2024
	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Badan Pangan	2024

Sumber: Penulis (2025)

yang disusun menggunakan 4 dimensi (kohesi, ekonomi, politik dan sosial) dengan 6 indikator (Tabel 2)⁶. Nilai indeks FRI diperoleh dengan menggunakan metode perhitungan Indeks Pembangunan Manusia, dengan formula sebagai berikut:

$$FRI = 1 - \sqrt[4]{Indeks Kohesi \times Indeks Ekonomi \times Indeks Politik \times Indeks Sosial}$$

Di mana:

- *Indeks Kohesi* = $1 - \frac{IKUB - IKUBmin}{IKUBmax - IKUBmin}$
- *Indeks Ekonomi*⁷ = $\frac{Indeks IG + Indeks Pengkap}{2}$
- *Indeks Politik* = $1 - \frac{IDI - IDImin}{IDImax - IDImin}$
- *Indeks Sosial* = $\frac{Indeks PKP + Indeks IKP}{2}$

Tabel 3. Kategorisasi FRI Indonesia 2024

KATEGORI	RENTANG NILAI	DEFINISI
Tinggi	$FSI > \mu + ?$ FRI > 0,255	Provinsi dengan risiko kerapuhan atau kerentanan atau ketidakstabilan tinggi dibanding provinsi lain sehingga dapat dijadikan prioritas
Sedang	$\mu - ?$ $FRI ? \mu + ?$ 0,185 ? FRI ? 0,255	Provinsi dengan risiko kerapuhan atau kerentanan atau ketidakstabilan sedang dibanding provinsi lain.
Rendah	$FRI < \mu - ?$ FRI < 0,185	Provinsi dengan risiko kerapuhan atau kerentanan atau ketidakstabilan rendah dibanding provinsi lain.

Sumber: Penulis (2025)

dan standar deviasi (σ) sebagaimana tergambar pada Tabel 3.

Berdasarkan perhitungan, terdapat 3 provinsi dengan kategori rendah, yakni Provinsi Bali, Daerah Khusus Jakarta, DI Yogyakarta. Jumlah provinsi pada kategori sedang sebanyak 26 provinsi. Sedangkan provinsi pada

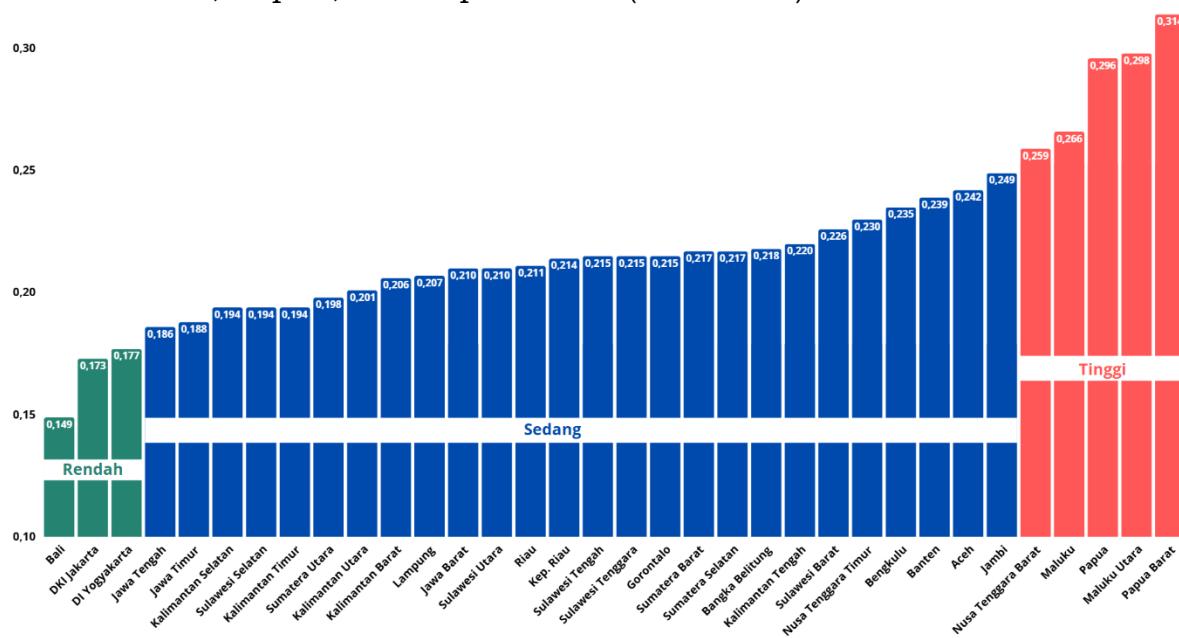
Nilai skor FRI berada dalam rentang 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1 diartikan semakin rapuh atau rentan.

Dalam rangka memetakan wilayah dengan tingkat prioritas, penulis melakukan kategorisasi nilai perhitungan menjadi tinggi, sedang dan rendah, dengan menggunakan nilai rata-rata (μ)

⁶ IDI adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia berdasarkan tiga aspek utama demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil, Hak Politik, dan Lembaga Demokrasi. IKUB adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kerukunan antar umat beragama di Indonesia, dengan menggunakan 3 dimensi yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama antar berbagai kelompok agama di Indonesia. IG adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu populasi. Pengkap adalah rata-rata pengeluaran per orang dalam suatu populasi yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity* atau PPP). Ini berarti pengeluaran ini memperhitungkan perbedaan harga barang dan jasa di berbagai lokasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat tentang daya beli masyarakat. PKP adalah persentase penduduk yang mengalami kekurangan pangan, baik secara kualitas maupun kuantitas, hingga tingkat sedang atau parah. Ini mencerminkan kondisi di mana individu atau rumah tangga tidak memiliki akses terhadap makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dasar mereka. IKP adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah, yang tidak hanya mengukur ketersediaan pangan, tetapi juga aspek akses, pemanfaatan, dan stabilitas pasokan pangan. Dengan kata lain, IKP memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara berkelanjutan.

⁷ $Indeks IG = 1 - \frac{IG - IGmin}{IGmax - IGmin}$, $Indeks Pengkap = \frac{\ln(Pengkap) - \ln(Pengkapmin)}{\ln(Pengkapmax) - \ln(Pengkapmin)}$. Pengkap minimum dan maksimum menggunakan nilai dari minimum dan maksimum pengkap perhitungan IPM. ⁷ $Indeks PKP = 1 - \frac{PKP - PKPmin}{PKPmax - PKPmin}$, $Indeks IKP = \frac{IKP - IKPmin}{IKPmax - IKPmin}$

kategori tinggi sebanyak 5, yakni Provinsi Maluku, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat (Gambar 4).



Gambar 4. Skor *Frigile Regional Index* 2024

Sumber: Hasil Perhitungan Penulis

Apabila berdasarkan kategorisasi per dimensi, terdapat beberapa provinsi yang perlu menjadi prioritas perhatian BIN guna mendeteksi dan mengantisipasi ancaman keamanan negara menurut dimensi (Tabel 4).

Tabel 4. Provinsi Dengan Dimensi Kategori Tinggi

Kohesi	Ekonomi	Politik	Sosial
Jawa Barat	Jawa Barat	Papua	Papua
Sumatera Barat	Sulawesi Tenggara	Papua Barat	Papua Barat
Banten	Gorontalo	Nusa Tenggara Barat	Maluku Utara
Aceh	Nusa Tenggara Timur	Maluku Utara	Maluku
Jambi	Papua	Maluku	Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat	Papua Barat		
Maluku Utara			

Sumber: Hasil Perhitungan Penulis, diolah.

Catatan Rekomendasi

Dalam konteks menopang target *Fragile State Index* sebesar 59,2 pada 2029 dalam RPJMN 2025-2029, perencanaan dan pelaksanaan anggaran program pengembangan, penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan keamanan negara BIN tahun 2026 perlu diprioritaskan pada upaya deteksi dan antisipasi ancaman keamanan negara pada wilayah yang memiliki risiko ancaman/kerentanan terhadap keamanan negara lebih tinggi dibanding wilayah lain. Berdasarkan perhitungan FRI, **Komisi I DPR RI perlu mendorong BIN memperkuat koordinasi dan penggalangan dengan stakeholders lain guna pendekripsi dan antisipasi ancaman keamanan negara, dengan berfokus pada beberapa hal, antara lain:**

- Memprioritaskan Provinsi Maluku, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, mengingat skor FRI kelima provinsi berada pada

kategori tinggi. Apabila berdasarkan capaian per dimensi pada setiap provinsi-provinsi tersebut, upaya BIN dapat berfokus pada dimensi dengan kategori tinggi, yakni:

- ✓ Provinsi Papua dan Papua Barat dapat berfokus pada dimensi ekonomi, politik, dan sosial,
 - ✓ Provinsi Nusa Tenggara Barat berfokus pada dimensi kohesi dan politik,
 - ✓ Provinsi Maluku berfokus pada dimensi politik dan sosial, serta
 - ✓ Provinsi Maluku Utara berfokus pada dimensi politik dan sosial.
- b) Memprioritaskan upaya deteksi dan antisipasi ancaman keamanan negara pada beberapa provinsi, selain Provinsi Maluku, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat yang berada pada kategori tinggi menurut dimensi, yakni antara lain:
- ✓ Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat, Banten, Aceh, dan Jambi untuk dimensi kohesi.
 - ✓ Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo untuk dimensi ekonomi.
 - ✓ Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dimensi sosial.

Daftar Pustaka

- Badan Pangan. 2025. Indeks Ketahanan Pangan Provinsi. Diakses dari <https://satudata.badanpangan.go.id/datasetpublications/tl/indeks-ketahanan-pangan-prov>.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2025. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2024 Audited. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.
- Badan Pusat Statistik. 2025a. Indeks Demokrasi Indonesia. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE1OSMy/-metode-baru-indeks-demokrasi-indonesia-menurut-provinsi.html>.
- Badan Pusat Statistik. 2025b. Gini Rasio Menurut Provinsi dan Daerah. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/gini-ratio-menurut-provinsi-dan-daerah.html>.
- Badan Pusat Statistik. 2025c. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE2IzI=/-metode-baru-pengeluaran-per-kapita-disesuaikan.html>.
- Badan Pusat Statistik. 2025d. Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang dan Berat. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3NCMy/prevalensi-penduduk-dengan-kerawanan-pangan-sedang-atau-berat-berdasarkan-pada-skala-pengalaman-kerawanan-pangan.html>.
- Kementerian Agama. 2025. Indeks Kerukunan Umat Beragama. Diakses dari <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/halaman/dashboard-indeks-kub>.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029.
- The Fund For Peace. 2025. Fragile States Index. Diakses dari <https://fragilestatesindex.org/excel/>.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011.

_____. Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

_____. Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

_____. Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.



Analisis **PAGU ANGGARAN** 2025



PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Lantai 6
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.bk.dpr.go.id